

Diseminasi Hasil Studi *Baseline* Kualitatif Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Bappenas Tahun 2021

Nurhayat Indra

Institut Manajemen Koperasi Indonesia

nurhayatindra@ikopin.ac.id

Abstrak

Direktorat PMD Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan konsultan penyedia barang dan jasa telah melaksanakan studi kualitatif dasar Pemetaan kondisi awal (*baseline data*) kapasitas pemerintah desa dan masyarakat di desa-desa lokasi P3PD sebelum pelaksanaan intervensi program Komponen 1 dan Komponen 2 diluncurkan akhir 2021 sampai dengan akhir 2025. Tujuan akhir dari program ini adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas belanja desa yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian sudah selesai dilaksanakan dan hasilnya harus didesiminasikan kepada para pemangku kepentingan untuk dijadikan landasan evaluasi ada tidaknya perubahan dan dampak program P3PD yang telah ditetapkan dan penyempurnaan pendekatan dan program P3PD yang telah dirancang sebelumnya.

Kata Kunci: Desa, Penguatan, Kapasitas, Pemerintah, Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Pada periode April sampai dengan Juli 2021, Kementerian PPN/Bappenas melalui direktorat pembangunan daerah telah melaksanakan penelitian kualitatif dasar (*baseline*) sebagai kegiatan awal sebelum implementasi program Penguatan Kapasitas Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) yang sudah dirancang untuk jangka waktu lima tahun ke depan (2021-2025). Program P3PD dirancang untuk menjawab bahwa intervensi pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal berupa transfer dana desa yang jumlahnya terus meningkat dari 20,67 triliun rupiah pada tahun 2015 hingga 72 triliun rupiah pada tahun 2019 masih belum mampu mengatasi permasalahan desa yaitu kemiskinan dan kesenjangan yang masih relatif tinggi. Menurut hasil penelitian *World Bank*, kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis pada prioritas kebutuhan masyarakat,

masalah serta potensi desa. P3PD dirancang dalam empat komponen program: komponen 1. Pemberdayaan Pemerintah Desa (Kementerian Dalam negeri); Komponen 2. Pemberdayaan Masyarakat (Kementerian Desa, transmigrasi dan daerah tertinggal); Komponen 3. Insentif Berbasis Kinerja (Kementerian Keuangan); serta Komponen 4. Pelaporan dan Koordinasi (Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PKM).

Penelitian *baseline* kualitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi: (1) kapasitas pemerintah desa, (2) kapasitas masyarakat dalam pembangunan desa, (3) partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, (4) akuntabilitas masyarakat dalam pembangunan, (5) kondisi literasi digital masyarakat, serta (6) faktor kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian telah dilaksanakan di empat Provinsi yaitu: Sumatera Selatan (Kabupaten Musi Banyuasin), Jawa Tengah (Kabupaten Sukoharjo), Nusa Tenggara Barat (Kabupaten

Lombok Barat dan Lombok Utara), serta Kalimantan Selatan (Kabupaten Tanah Bumbu).

Kegiatan diseminasi hasil penelitian dasar kualitatif ini disampaikan kepada para pemangku kepentingan P3PD dari seluruh Kementerian dan Lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap komponen intervensi dan representasi dari pemerintah daerah calon penerima manfaat dari program. Adapun tujuannya adalah memberikan informasi dasar hasil pemetaan tentang : (1) kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan penyusunan regulasi; (2) kapasitas masyarakat dalam pembangunan desa; (3) partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa; (4) partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan akuntabilitas pembangunan; (5) kondisi literasi digital; masyarakat; serta (6) kondisi dan kinerja kelembagaan masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam pembangunan. Data dan informasi dasar ini akan dijadikan acuan untuk mengevaluasi apakah intervensi P3PD berdampak positif terhadap perubahan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat yang akan diukur pada akhir program (*endline*) dan berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan masyarakat desa. Selain itu, informasi dasar ini akan memberikan masukan bagi penyempurnaan program dan kegiatan serta pendekatan implementasi intervensi P3PD yang sudah dirancang sebelumnya.

II. METODE

1) Tahapan Aktivitas yang Dilakukan

Kegiatan diseminasi hasil penelitian baseline kualitatif P3PD ini diorganisasikan oleh PT. Binadaya Inti Dinamika, sebagai perusahaan konsultan yang dikontrak oleh Bappenas untuk mengerjakan pekerjaan ini. Penyusunan kerangka acuan pekerjaan, penyusunan jadwal acara dan undangan dilakukan oleh pihak manajemen konsultan dan tim teknis dari Bappenas. Penulis sebagai ketua tim penelitian dibantu oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat menyiapkan materi diseminasi berupa ringkasan hasil studi, simpulan dan rekomendasinya dalam bentuk PPT. Sebelum disampaikan kepada forum peserta di tingkat nasional, materi diseminasi terlebih dahulu didiskusikan di forum internal tim teknis Bappenas untuk mendapatkan masukan dan persetujuan tentang jumlah *slide*, waktu paparan, substansi hasil penelitian, simpulan dan rekomendasi.

Peserta kegiatan diseminasi terdiri dari representasi Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan empat komponen P3PD, representasi dari empat provinsi dan kabupaten wilayah penelitian dan calon penerima manfaat dari program, ketua tim dan tenaga ahli penelitian, tim teknis Bappenas, dan wakil dari manajemen konsultan. Jumlah peserta keseluruhan sebanyak 45 orang. Kegiatan diseminasi dilakukan melalui *zoom meeting* yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2021. Berikut adalah susunan acara kegiatan diseminasi hasil penelitian kualitatif dasar P3PD.

Tabel 1.
Rundown acara diseminasi Hasil Studi Baseline Kualitatif P3PD

No	Waktu	Materi	Narasumber
14 Juli 2021			
1	09.00 – 09.30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembukaan: ▪ Sambutan dan pengarahan diseminasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappenas
2	09.30 – 10.00	Presentasi hasil studi baseline kualitatif P3PD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nurhayat Indra (Ketua Tim Konsultan)
4	10.00 – 11.30	Sesi tanggapan dan tanya jawab	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moderator dari Bappenas ▪ Pemakalah (Nurhayat Indra) ▪ Perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait P3PD ▪ Perwakilan dari Provinsi dan Kabupaten wilayah studi dan calon penerima manfaat.
5	11.30 – 12.00	Kesimpulan dan rencana tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moderator dari Bappenas

2) Tim yang Terlibat Dalam Kegiatan

Pekerjaan studi baseline kualitatif P3PD merupakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa konsultasi yang dilaksanakan oleh pihak ke tiga sebagai pemenang lelang terbuka yaitu perusahaan konsultan penyedia barang dan jasa PT. Bina daya Inti Dinamika. Oleh karena itu tim yang terlibat dalam kegiatan diseminasi hasil ini terkait dengan tiga pihak, yaitu Bappenas dalam hal ini direktorat pembangunan daerah sebagai pemilik pekerjaan, perusahaan konsultan pelaksana, serta tenaga ahli yang dikontrak untuk melaksanakan pekerjaan penelitian.

3) Persiapan *Tools* Dan Materi

Kegiatan diseminasi hasil penelitian P3PD awalnya dirancang secara tatap muka karena pada bulan Juli 2021 diprediksi pandemi Covid-19 di tanah air akan mereda, tetapi kondisi sebaliknya terjadi pada bulan ini justru Indonesia masuk gelombang ke-dua Covid-19 yang paling parah. Oleh karena itu penyelenggaraan diseminasi hasil dilakukan secara *online* dengan menggunakan fasilitas *zoom meeting*. Persiapan teknis *zoom meeting* dilakukan oleh pihak manajemen

konsultan, materi disiapkan oleh ketua tim, sedangkan undangan kepada Kementerian dan Lembaga terkait serta perwakilan dari daerah penelitian dilakukan oleh Bappenas. Substansi materi diseminasi mencakup:

1. Pendahuluan (latar belakang, tujuan, dan sasaran)
2. Disain riset (wilayah sampel, informan, dan *theoretical change*)
3. Temuan Penelitian
4. Simpulan umum dan rekomendasi.

4) Penentuan Peserta

Sasaran utama diseminasi hasil baseline studi kualitatif P3PD adalah Kementerian dan Lembaga yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan empat komponen P3PD yang telah disampaikan di depan yaitu: perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Komponen 1); Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal (komponen 2), Kementerian Keuangan (komponen 3), serta Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PKM (komponen 4). Selain itu, peserta diseminasi juga berasal dari perwakilan provinsi dan kabupaten tempat studi dan calon penerima manfaat P3PD.

Jumlah peserta yang hadir sebanyak 35 orang.

5) Metoda Penyampaian Materi

Metode yang digunakan dalam kegiatan diseminasi ini adalah paparan hasil dengan menggunakan visualisasi *slide PPT* dan dilanjutkan dengan diskusi, tanggapan dan tanya jawab. Keseluruhan acara dipandu oleh moderator atau pimpinan diskusi yang berasal dari Direktorat Pembangunan Daerah Bappenas.

6) Evaluasi Kegiatan

Efektivitas proses dan pencapaian tujuan kegiatan diseminasi secara langsung diamati oleh penulis sebagai nara sumber tunggal pada kegiatan ini. Indikator evaluasi menggunakan jumlah peserta yang hadir di ruang zoom meeting, antusiasme peserta dalam memberikan

tanggapan hasil dan rekomendasi studi, serta pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait berbagai hal seperti metodologi, pengolahan data dan validitas informan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bagian pendahuluan artikel ini, bahwa kegiatan diseminasi hasil studi kualitatif P3PD ini adalah untuk memberikan informasi dasar tentang kondisi kapasitas pemerintah desa dan masyarakat beserta kelembagaannya dalam proses pembangunan desa yang diawali dari perencanaan. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta pelaporannya kepada publik secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pada bagian ini penulis menyajikan hasil temuan studi, simpulan dan rekomendasinya secara ringkas.

Temuan 1 : Kapasitas Pemerintah Desa



Kab. Sukoharjo

- Kapasitas Pemerintah desa di desa calon intervensi maupun kontrol dalam perencanaan pembangunan desa masih lemah. Hal ini disebabkan karena lemahnya kemampuan tim 9 atau 11 untuk pengumpulan dan penggalian data yang cukup banyak dan kompleks, melalui PRA (*participatory rural appraisal*) sangat lemah sehingga menyebabkan RPJMDes belum mencerminkan kondisi dan masalah desa sesungguhnya, sementara fasilitasi dari Pendamping Desa juga lemah (hanya memberikan *file template* RPJMDes dengan dominasi pembangunan fisik untuk dikerjakan).
- Hal ini juga menyebabkan program pembangunan fisik selalu muncul lebih banyak sementara program pemberdayaan masih banyak belum tersentuh.
- Kapasitas BPD dan perangkat aparat desa juga lemah (karena faktor usia dan faktor kemauan) untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh UU Desa. Ada isu bahwa rerkrutasi perangkat desa juga kurang transparan.

Kab. Musi Banyuasin

- Kapasitas Pemerintah Desa dalam perencanaan pengelolaan keuangan, penyusunan regulasi dan adaptasi dan inovasi digital di desa desa calon intervensi dan kontrol kondisinya sama saja.
- Dokumen dokumen perencanaan seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes pada umumnya dibuat oleh PD dan PLD. Musyawarah musyawarah tingkat dusun dan desa hanya formalitas saja, masyarakat tidak terlibat dan yang diundang biasanya keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Kepala Desa (*partisipatif semu*).
- Kepala desa memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan desa.
- BPD juga cenderung *yes man*, kurang kritis menjalankan fungsi legislasid dan permusawarahat desa. Hanya di desa sukaram yang BPD nya tegas dan selaluberkontradeng Kepala Desanya.
- Penggunaan *Siskeudes* oleh aparat desa masih lemah dan banyak kekeliruan dalam pelaporan

Kab. Lombok Utara & Barat

- Sebagian besar BPD kurang memahami alur proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa.
- BPD tidak memahami tugas dan fungsinya dalam penyusunan Peraturan Desa. Inisiatif penyusunan Peraturan Desa dari Pemerintah Desa.
- Penggalian gagasan untuk perencanaan tidak dilakukan dengan proses yang partisipatif. Penggalian gagasan di tingkat dusun tidak dilakukan musyawarah bersama masyarakat dusun, tetapi kepala dusun yang membaca dan memperkirakan kebutuhan masyarakat kemudian disampaikan kepada tingkat musyawarah desa.
- Kepala desa seperti raja-raja kecil yang memiliki kewenangan kuat yang kadang-kadang sulit diatur suprades.

Kab. Tanah Bumbu

- Pelatihan Kades dan BPD hanya setelah dilantik saja, peserta kurang disiplin. Sepertinya kurang terjadi internalisasi untuk menjalankan tugas Kades dan BPD secara profesional. Metode pelatihan boleh jadi membosankan.
- Belum semua perangkat desa yang melaksanakan penyusunan draft perencanaan memperoleh bimbingan dari Suprades dan para Pendamping, sehingga bisa jadi produk perencanaan disusun sesuai template saja, belum mengeksplorasi dan kebutuhan masyarakat secara mendalam.
- Kepala desa memiliki pengaruh yang besar, proses perencanaan melalui musyawarah musyawarah yang panjang sekedar formalitas sebagian masyarakat kurang berminat untuk hadir dan menyuarakan keinginannya karena dokumen perencanaan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes dibuat berdasarkan template dari PD dan PLD atas pesanan Kades dan cenderung menguntungkan kelugadannya kroninya saja.
- Penggunaan *Siskeudes* untuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran juga masih banyak masalah.



Temuan 2 : Kapasitas Masyarakat Desa

Kab. Sukoharjo

- Kapasitas masyarakat dalam penyampaian gagasan dan usulan perencanaan pembangunan masih kurang, biasanya hanya diberikan formulir isian oleh RT dan RW, dikumpulkan kemudian disampaikan dalam forum RT dan RW, padahal tradisi dan kultur masyarakat Jawa pada umumnya senang diajak musyawarah dan berembung.
- Fasilitas pendampingan dari KPMD juga kurang untuk pengalihan gagasan yang komprehensif melalui PRA, tidak dilakukan sehingga pemahaman masyarakat terhadap masalahnya sendiri masih kurang.
- Hal ini menyebabkan usulan dalam musyawarah yang muncul selalu pembangunan fisik. Sosialisasi mengenai adanya dana untuk program pemberdayaan dari Pemerintah desa dan Pendamping juga kurang. Padahal jika dipetakan masalah untuk pemberdayaan ekonomi produktif baik bagi kelompok perempuan dan pemuda sesuai dengan potensi desa banyak.

Kab. Musi Banyuasin

- Kapasitas masyarakat dalam penyampaian gagasan dan usulan pembangunan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan masih lemah. Lembaga-lembaga seperti PKK, KPM, RT, RW, Kepala Dusun dan Tokoh masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan desa akibatnya mereka tidak mengetahui apa isi dari dokumen perencanaan tersebut bahkan mereka tidak mengetahui apa itu RPDDes, RKPDes dan APBDDes
- Fasilitas pengalihan gagasan dari KPMD tidak dilakukan apalagi KPMD di desa-desa kecamatan Sekayu dan Sangat Desa baru dibentuk
- Dominasi kepala desa sangat kuat untuk menggunakan kewenangannya sementara BPD lemah dan cenderung tertutup (terindikasikannya pada saat awal tim survey masuk cenderung menolak dan meminta surat persetujuan dari DPMD dan Kecamatan)

Kab. Lombok Utara & Barat

- Kapasitas masyarakat dalam penyampaian usulan dan gagasan pada tahap perencanaan di tingkat musyawarah dusun sangat kurang, karena kebutuhan masyarakat hanya diduga oleh kepala dusun saja.
- Dalam musrenbang perwakilan masyarakat diundang dan mendengarkan paparan program yang tinggal diputuskan.

Kab. Tanah Bumbu

- Kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa-desa calon intervensi dan kontrol hampir tidak memiliki perbedaan
- Masyarakat pada umumnya tidak mengerti dan memahami dokumen-dokumen perencanaan yang ada, mereka diundang untuk musyawarah hanya formalitas saja, untuk mendengarkan penyampaian program secara garis besar yang sudah disiapkan
- Pengalihan gagasan yang mendalam dengan fasilitas PD dan PLD melalui PRA, sketsa desa, diagram kelembagaan, kalender musim tidak berjalan hanya dibuat di atas meja. PD dan PLD hanya memfasilitasi kepentingan Pemerintah desa dan memfasilitasi program-program dari pusat seperti Sunting, SDG.S, dll.
- Dominasi kepala desa sangat kuat untuk menggunakan kewenangannya, sementara BPD lemah dan cenderung tertutup (terindikasikannya pada saat awal tim survey masuk cenderung menolak dan meminta surat persetujuan dari DPMD dan Kecamatan)



Temuan 3 : Partisipasi Masyarakat Desa

Kab. Sukoharjo

- Partisipasi masyarakat kaum marginal dan rentan dalam pelaksanaan sebagai penerima manfaat program-program penanggulangan kemiskinan seperti PKH dan BLU. Dalam perencanaan memiliki kelompok pembela baik dari RT, RW dan komunitas
- Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik swakelola seperti rabat jalan pengaspalan cukup baik
- Partisipasi kelompok perempuan dan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan sesuai tujuannya kegiatan penyuluhan, pengada sarana olah raga dan kesenian tetapi masih lemah dalam pemberdayaan karena jarang yang mengusulkan

Kab. Musi Banyuasin

- Partisipasi masyarakat kelompok marginal dan rentan, perempuan dan pemuda dan Lembaga-lembaganya seperti PKK, KPM, RT, RW dan Kepala Dusun masih lemah. Mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan desa akibatnya mereka tidak mengetahui apa isi dari dokumen perencanaan tersebut bahkan mereka tidak mengetahui apa itu RPDDes, RKPDes dan APBDDes.
- Dalam pelaksanaan juga proyek-proyek pembangunan fisik banyak dikerjakan oleh keluarga dan kroni dari kepala desa.

Kab. Lombok Utara & Barat

- Partisipasi kelompok marginal dalam pelaksanaan pembangunan masih sangat kurang, jarang melibatkan diri karena kesibukan memenuhi hidup sehari-hari. Biasanya kepala dusun/RT yang menyampaikan perkiraan kebutuhan mereka di musyawarah desa.
- Keterlibatan perempuan dan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan juga masih kurang. Biasanya keterlibatan perempuan yang diwakili PKK hanya sebatas kegiatan penyuluhan yang memiliki inisiatif untuk mengusulkan/merencanakan terkaik kebutuhan perempuan pada umumnya.

Kab. Tanah Bumbu

- Karena tidak pernah dilibatkan tidak berpartisipasi dalam proses perencanaan hanya dikuasai elit desa, orang terdekat, kerabat dan orang yang tidak membuat elit desa perlu bersusah payah untuk menjelaskan kalau ada yang ditanyakan masyarakat lainnya para pemegang kekuasaan di desa masih alergi dengan keterbukaan dan musyawarah Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga cenderung pasif.



Temuan 4 : Akuntabilitas Masyarakat Desa

Kab. Sukoharjo

- Proses keterbukaan terhadap pembangunan sudah cukup terlihat di desa-desa di Kec Bendosari dan Kec Grogol, hal ini disebabkan karena tuntutan masyarakat tentang keterbukaan penggunaan dana anggaran APBDes dan pihak pemerintah desa sudah ke arah keterbukaan ini, hal ini merupakan tuntutan masyarakat mana sifatorang Jawa yang cepat tanggap, maka apabila tidak ada keterbukaan akan mengakibatkan keributan di dalam desa

Kab. Musi Banyuasin

- Laporan pertanggungjawaban terhadap Dana Desa tidak pernah dilaporkan kepada masyarakat melalui forum musyawarah hanya dipajang di balho di depan kantor desa (tetapi ditulis hanya point-point nya saja).
- BPD pada umumnya pro Kepala Desa (kecuali desa Sukarame) sehingga apa pun kebijakan dan laporan dari Kepala Desa disetujui oleh ketua BPD dan perangkatnya

Kab. Lombok Utara & Barat

- Hampir semua desa ada musyawarah pertanggungjawaban penggunaan APBDes oleh Pemerintah desa, dan ada media seperti balho yang dipasang di depan kantor desa terkait sumber-sumber pendanaan dan pengeluaran pemerintah desa dan peruntukannya.

Kab. Tanah Bumbu

- Transparansi masih sebatas menampilkan RKP desa dengan balho tapi masyarakat tidak memahami datangnya usulan itu, padahal semestinya usulan-usulan yang dipertanggungjawabkan itu adalah dari suatu proses besar perencanaan desa untuk 6 tahun ke depan yang melibatkan masyarakat yang sesuai dengan visi misi kepala desa.
- Pembangunan fisik ada dengan kualitas seadanya, tetapi pola pikir masyarakat tidak dibangun untuk kritis. Masyarakat kurang memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab untuk memelihara hasil-hasil pembangunan.



Temuan 5 : Kemampuan Literasi Digital

Kab. Sukoharjo

- Kemampuan literasi digital masyarakat dalam hal mencari informasi dan menyebarkan informasi sudah cukup baik. Sebagai modal sosial untuk masyarakat semakin kritis pada pemerintah desanya.
- Pemanfaatan media sosial untuk berbagai kepentingan yang beragam dari komunikasi dengan keluarga, komunitas, pencarian informasi politik, bisnis, hiburan, dan kesehatan.
- Infrastruktur jaringan internet juga pada umumnya cukup baik.
- Belum ada pemberdayaan digital dari pihak pemerintah desa.

Kab. Lombok Utara & Barat

- Kemampuan literasi digital masyarakat dalam hal mencari informasi dan menyebarkan informasi sudah cukup baik.
- Pemanfaatan media sosial untuk berbagai kepentingan yang beragam dari komunikasi dengan keluarga, komunitas, pencarian informasi politik, bisnis, hiburan, dan kesehatan.
- Infrastruktur jaringan internet juga pada umumnya cukup baik.
- Belum ada pemberdayaan digital dari pihak pemerintah desa.

Kab. Musi Banyuasin

- Kemampuan literasi digital masyarakat dalam hal mencari informasi dan menyebarkan informasi sudah cukup baik.
- Pemanfaatan media sosial untuk berbagai kepentingan yang beragam dari komunikasi dengan keluarga, komunitas, pencarian informasi politik, bisnis, hiburan, dan kesehatan.
- Infrastruktur jaringan internet juga pada umumnya cukup baik.
- Belum ada pemberdayaan digital dari pihak pemerintah desa.

Kab. Tanah Bumbu

- Kemampuan literasi digital masyarakat dalam hal mencari informasi dan menyebarkan informasi sudah cukup baik.
- Pemanfaatan media sosial untuk berbagai kepentingan yang beragam dari komunikasi dengan keluarga, komunitas, pencarian informasi politik, bisnis, hiburan, dan kesehatan.
- Infrastruktur jaringan internet juga pada umumnya cukup baik.
- Belum ada pemberdayaan digital dari pihak pemerintah desa.



Temuan 6 : Kelembagaan Masyarakat Desa

Kab. Sukoharjo

- Kedalaman dan kelebaran jenis ragam kelembagaan masyarakat relatif lebih baik dibandingkan di 3 kabupaten wilayah studinya
- Keswadayaan kelembagaan masyarakat sudah mulai tumbuh ke arah yang positif
- Ada **point** menarik di Desa Teluan (calon intervensi) karena Ibu Kades cukup aktif dalam menggerakkan pemberdayaan perempuan. Sudah beberapa tahun bekerja sama dengan Wahid Foundation, maka pada bulan Mei 2021 lalu meluncurkan Desa Damai. Kegiatannya lebih mendorong ke toleransi umat beragama dan pemberdayaan perempuan

Kab. Musi Banyuasin

Swadaya kelembagaan masih lemah, tergantung dana desa. Sebagian besar kelembagaan seperti Karang Taruna, Linmas, BKD, LPM kurang aktif. Tidak paham tugas dan fungsinya diundang rapat hadir tetapi hanya sebatas itu. Tidak pernah memiliki rencana kerja, tidak pernah ada rapat koordinasi dan jarang ada pembinaan dari PD, PLD dan KPMD. RT dan KPMD di desa-desa calon intervensi dan kontrol baru terbentuk pertengahan 2020 lalu, belum melaksanakan tugasnya menjadi mitra strategis pemerintah desa.

Kab. Lombok Utara & Barat

- Swadaya kelembagaan masih lemah tergantung pada dana desa.
- Sebagian besar kelembagaan seperti Karang Taruna, Linmas, BKD, LPM kurang aktif. Tidak paham tugas dan fungsinya. Diundang rapat hadir tetapi hanya sebatas itu.
- Tidak pernah memiliki rencana kerja, tidak pernah ada rapat koordinasi. Jarang ada pembinaan dari PD, PLD dan KPMD.
- KPMD yang diharapkan mampu melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan tidak aktif.
- **Point** menarik di desa-desa calon intervensi ada lembaga adat "Majelis Kerama Desa/MKD" yang aktif menangani dan mediasi konflik ringan non pidana di masyarakat.

Kab. Tanah Bumbu

- Swadaya kelembagaan masih lemah, tergantung dana desa.
- Sebagian besar kelembagaan seperti Karang Taruna, Linmas, BKD, LPM kurang aktif. Tidak paham tugas dan fungsinya. Diundang rapat hadir tetapi hanya sebatas itu.
- Tidak pernah memiliki rencana kerja, tidak pernah ada rapat koordinasi antar anggota. Jarang ada pembinaan dari PD, PLD dan KPMD.
- Lembaga keagamaan seperti Yasinan dan Rukun Kematian cukup aktif dengan keswadayaan bagus.
- KPMD yang diharapkan mampu melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan tidak aktif.



Kesimpulan Umum

1. Ditemukan ada indikasi bahwa kualitas belanja desa yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di wilayah perdesaan secara signifikan, karena kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, prosesnya belum dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa secara baik dan benar. Pengalihan gagasan masih dangkal dan forum forum musyawarah hanya formalitas saja. Dokumen dokumen perencanaan disusun oleh para Pendamping Desa dengan kecenderungan **template** pola yang seragam berorientasi pada program pembangunan fisik sementara program pemberdayaan masih lemah. Hal ini secara langsung berpengaruh pada pengelolaan keuangan, pengaturan pemanfaatan sumber daya, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan akuntabilitasnya.
2. Peran Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa belum efektif untuk meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam melaksanakan proses pembangunan desa yang inklusif dan kompleks, pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kualitas belanja yang efektif dan efisien.
3. Ketersediaan infrastruktur digital dan literasi digital baik pemerintah desa maupun masyarakat yang semakin baik, merupakan modal sosial untuk mendorong keterbukaan dan keaktifan masyarakat dalam pembangunan desa yang inklusif dan efektif



Saran

PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DES KOMPONEN 1 (KEMENDAGRI)	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT KOMPONEN 2 (KEMENDES DAN PD TT)
<p>Dalam upaya mempercepat terjadinya proses perubahan peningkatan kualitas belanja desa makaberdasarkan permasalahan dan temuannya studi ini merekomendasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas aparatur dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPM) tingkat kabupaten dan kecamatan agar dapat merancang program-program pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang efektif bagi pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan • Peningkatan efektivitas istem di tingkat dan bimbingan teknis kapasitas pemerintah desa dan BPD (yang memiliki kewenangan untuk membentuk 9 atau 11) di fokus kepada kapasitas yang kritis dan mendesak yaitu (1) perencanaan pembangunan desa baik jangka panjang (RPJMDes) maupun jangka pendek (RKPDDes) yang sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat yang diusulkan secara partisipatif (2) kapasitas inovasi pemanfaatan potensi unggulan desa yang dapat meningkatkan kapasitas fiskal pendapatan dan belanja desa untuk mengurangi ketergantungan permanen pada transfer dana desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam upaya meningkatkan efektifitas, sinergitas dan koordinasi pendampingan di tingkat desa, diperlukan penyempurnaan: (1) pola rekrutasi baik Tenaga Ahli profesional, Pendamping Desa, maupun Pendamping Lokal Desa dengan memperhatikan kompetensi sesuai dengan dinamika dan permasalahan desa yang kompleks, (2) penyempurnaan sistem pengembangan kapasitas Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa agar dapat menjalankan peran, fungsi dan tugasnya sebagai agen perubahan dan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaannya. • Penguatan kapasitas KPMD melalui kaderisasi dari Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa terkait metodologi perencanaan partisipatif melalui penggalan gagasan dan usulan masyarakat yang kongkrit dan realistis dengan metoda-metoda partisipatif seperti PRA dan FGD dan mengawalnyadi berbagai tingkat masyarakat mulai tingkat dusun, hingga masyarakat tingkat desa/masyarakat awarapembangunan desa. • Optimalisasi pemanfaatan perpustakaan desa untuk pusat belajar masyarakat • Para Pendamping Desa dapat memfasilitasi akses pemerintah dan masyarakat desa kepada modul-modul <i>online</i> yang disediakan oleh <i>Platform</i> Akademi Desa 4.0. Platform ini telah menyediakan kurikulum dasar pelatihan antara lain yaitu: (1) Produk unggulan kawasan perdesaan, (2) BUMDes, (3) Perencanaan masyarakat desa, (4) <i>Good village government</i>, (5) Keuangan dan akuntansi desa, (6) Kepemimpinan desa, (7) Kewirausahaan desa, (8) Strategi pertumbuhan usaha desa, dan (9) Teknologi Tepat Guna Desa • KPMD dapat memfasilitasi masyarakat kepada pusat-pusat penyedia TTG (<i>Techno Park</i>), dan pusat-pusat layanan konsultasi dan praktik bisnis UMKM (Inkubator Bisnis, PLUT) dalam upaya pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat.

Dalam proses diskusi tanggapan dan tanya jawab, peserta dari perwakilan Kementerian dan Lembaga yang akan mengimplementasikan intervensi P3PD kepada pemerintah desa dan masyarakat, menerima hasil sudi ini dan akan dijadikan data dasar sebagai acuan untuk evaluasi akhir terjadinya perubahan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat serta dampak dari P3PD di akhir program tahun 2025 yang akan datang. Meskipun sebagian peserta masih ada yang mengkritisi masalah metodologi risetnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Proses kegiatan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian P3BD dapat berjalan dengan baik, diberikan tanggapan dan apresiasi yang positif oleh para pemangku kepentingan utama program dan akan ditindaklanjuti dengan penyempurnaan pendekatan dan program-program penguatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat berbasis digital untuk menuju Desa Pintar yang membawa peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa di masa mendatang.

Saran

Hasil-hasil studi serupa, sebaiknya didesiminasikan kepada seluruh pemangku kepentingannya dalam rangka sosialisasi dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap disain, implementasi dan evaluasi program dan kebijakan pembangunan.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- Kerangka Acuan Pekerjaan P3PD, 2021. Direktorat PMD Kementerian PPN/Bappenas.
- Laporan Akhir Baseline studi Kualitatif P3PD, 2021. Direktorat PMD Kementerian PPN/Bappenas.

